

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini pembangunan sumber daya manusia, khususnya perempuan sedang ditingkatkan. Kita dapat melihat kedudukan perempuan Indonesia dan berbagai peran dan posisi strategis baik di dalam dunia formal, maupun dunia nonformal. Keragaman peran perempuan tersebut menunjukkan bahwa perempuan Indonesia memang potensial apabila ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berperan. Berbagai masalah yang di hadapi perempuan diantaranya adanya masalah gender yaitu adanya ketidakmampuan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pendidikan dikarenakan berbagai alasan. Peran gender merupakan harapan mengenai tingkah laku feminin atau maskulin seseorang yang dibentuk oleh lingkungan sosial. Harapan tersebut dibangun, diabadikan oleh institusi dan nilai-nilai dari masyarakat tertentu. Peran gender adalah seperangkat harapan yang menentukan bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berpikir, bertingkah laku dan berperasaan (Santrock, 2003, hlm. 382).

Gagasan Engels tentang konsep gender bahwa perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan, konstruksi sosial, kultural, keagamaan bahkan melalui kekuasaan negara (Suyanto, 2010, hlm. 335). Oleh karena itu, maka lama-kelamaan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan menjadi seolah-olah ketentuan Tuhan yang tidak dapat ditawar. Hal ini membuat perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan (Fakih, 2010, hlm. 9). Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat oleh mereka yang menggunakan analisis gender adalah struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender tersebut, keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada hakekatnya adalah realita kehidupan manusia. Hubungan laki-laki dan perempuan bukan dilandasi dikotomis, bukan pula struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan kebersamaan untuk membangun kemitraan yang harmonis, karena setiap pihak punya kelebihan dan

kekurangan masing-masing, kekuatan sekaligus kelemahan yang perlu dilengkapi pihak lain melalui kerjasama. Budaya patriarki yang masih melekat kuat pada kultur masyarakat Indonesia menyebabkan ketidakadilan gender dan ketidakadilan tersebut termanifestasi dalam marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, kekerasan dan beban kerja yang tidak sesuai serta sosialisasi peran gender. Kebijakan publik masih membuka peluang sebesar-besarnya untuk terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan gender, kebijakan yang dihasilkan idealnya mampu mengakomodasi pengalaman perempuan dan tidak membatasi hak asasi perempuan dalam mengembangkan kapasitas dirinya. Sebaik apapun substansi kebijakan publik yang dibuat jika tidak diimplementasikan dengan baik maka kebijakan tersebut tidak akan berdampak kepada kepentingan public (Mulyadi, 2016, hlm. 30). Arah kebijakan pemberdayaan perempuan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan menetapkan perlunya meningkatkan peran perempuan dan kualitas peranan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Isu gender merupakan wacana dan pergerakan untuk mencapai kesetaraan peran, hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Pergerakan gender ini berputar tanpa henti di sekitar permasalahan yang terjadi terhadap perempuan di antaranya stereotyping, marginalisasi, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan., Ketidakadilan berbasis gender secara konseptual adalah satu reflektif akibat pendefinisian dan pembakuan peran-peran gender yang berbeda pada laki-laki dan perempuan terhadap sesuatu yang didasarkan atas pembagian kerja menurut kategori jenis kelamin dan asumsi ideologi patriarki (Fauzia, 2004, hlm. 21). Dengan kuatnya ideologi patriarki, laki-laki dan perempuan tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan peran sosial, kultural dan hukum. Sebagai upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di Indonesia, pemerintah menerbitkan Inpres No. 9 Tahun 2000.

Menurut data dari BPS Pada tahun 2020 angka rata-rata lama sekolah berdasarkan gender di Indonesia yang menunjukkan laki-laki 8,90 tahun dan perempuan 8,07 tahun, hal itu beriringan presentasi dari laki-laki yang berada pada posisi manager adalah 69, 37% sementara itu perempuan hanya 30,63% dan tentu saja itu berdampak pada pendapatan perempuan yang hanya menyumbang 37,26%

dari pendapatan nasional. Data-data tersebut menunjukkan bahwa ada jarak antara perempuan dan laki-laki, baik itu dalam hal rata-rata lama sekolah, persentase yang mengisi jabatan manager, apalagi pendapatan.

Membicarakan wacana gender dan kebijakan publik semakin menarik ketika menyimak komposisi partisipasi perempuan dalam dunia publik, kebijakan dari pemerintah Indonesia misalnya dalam pemilihan legislatif hanya mensyaratkan minimal 30% kuota perempuan dari setiap partai yang ikut pemilihan legislatif dan sejak saat peraturan itu disahkan tidak pernah tercapai angka 30% kuota perempuan di parlemen, artinya itu membatasi partisipasi perempuan di parlemen dan ini membuat peran perempuan menjadi minim dan cenderung pasif, hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia juga masih belum bisa mempercayakan dunia publik pada perempuan. Berkaca dari hal itu menarik dibahas implementasi dari sebuah kebijakan publik ditinjau persepektif gender. Maraknya kritik terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan yang bias gender, di susul komposisi partisipasi perempuan dalam dunia publik yang rendah. Alasan yang digunakan adalah mengesahkan posisi domestik perempuan yang sekaligus menafikkan peran publik dari perempuan termasuk peran secara langsung terlibat dalam kebijakan publik maupun proses partisipasi formulasi kebijakan publik dalam keberadaannya Kegiatan atau program dikatakan telah responsif gender apabila kebijakan, program, kegiatan atau kondisi yang sudah memperhitungkan kepentingan perempuan dan laki-laki. Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor dunia usaha sebagai akibat liberalisasi ekonomi, berbagai kalangan swasta. Organisasi masyarakat dan dunia pendidikan berupaya merumuskan dan mempromosikan peranan perempuan serta meningkatkan kualitas peranan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melihat komposisi partisipasi perempuan dalam dunia publik selalu menarik bila dibahas implementasi dari sebuah kebijakan publik ditinjau persepektif gender. Organisasi masyarakat dan dunia pendidikan berupaya merumuskan dan mempromosikan tanggung jawab sosial sektor usaha dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan. Salah satu program yang sedang gencar dilakukan saat ini adalah Lembaga kursus dan pelatihan secara etis dan

memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup dari para pengelola dan peserta didik pekerja dan keluarganya demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat secara luas. Sementara itu, Tasikmalaya sebagai suatu Kota Madya, terdapat 45 Lembaga Kursus dan Pelatihan yang terdaftar dan banyak perempuan yang berkarir di sana menurut penuturan dari ketua HIPKI Tasikmalaya. Bahkan bukan hanya berkarir sebagai pegawai, ada pula yang merupakan seorang pimpinan. Fenomena tersebut seolah menunjukkan bahwa perempuan juga bisa bersaing di wilayah publik, artinya ketika banyak perempuan bekerja di wilayah publik ada pembagian peran pada laki-laki dan perempuan yang bekerja di sana.

Dengan melihat kecenderungan yang sudah ada di lapangan bahwa konstruksi lingkungan sosial didalam masyarakat mengenai peran, posisi, tugas dan tanggung jawab yang berbeda antar laki-laki dan perempuan dibentuk pola bahwa perempuan lebih menganggap dirinya tidak perlu berpartisipasi dan berperan serta dalam pembangunan hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan gender dan kurang terpenuhinya hak-hak perempuan misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi perempuan masih menjadi masalah yang utama artinya bahwa kondisi perempuan belum mendapatkan perhatian yang berarti, Padahal hasil pembangunan akan lebih bermanfaat bagi perempuan jika perempuan tersebut terpenuhi segala kebutuhannya. Dengan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan dijadikan sebagai karya tulis ilmiah dengan judul **“Peran Gender Pada Lembaga Kursus dan Pelatihan Kota Tasikmalaya** “.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak terpenuhinya hak-hak perempuan misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
- 2) Partisipasi perempuan dalam ruang publik masih rendah
- 3) Perempuan seringkali memiliki peran yang minim dan cenderung pasif

- 4) Adanya isu gender, hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak setara
- 5) Struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender
- 6) Penguatan dan konstruksi sosial, kultural, dan keagamaan yang melekat di masyarakat membatasi peran perempuan

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran gender pada lembaga kursus dan pelatihan di kota tasikmalaya?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka manfaat penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran gender pada lembaga kursus dan pelatihan di kota tasikmalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan literatur ilmiah yang nantinya bisa dijadikan bahan kajian, penambah wawasan akademik mengenai kelimuan Pendidikan Masyarakat dengan memberikan referensi dan kajian teori mengenai studi gender

1.5.2 Kegunaan praktis

- 1) Bagi LKP bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan perekrutan pegawai.
- 2) Bagi masyarakat umum dapat menjadi referensi untuk menamnah pengetahuan.
- 3) Bagi peneliti dapat menambah wawasan serta memberikan pengalaman secara langsung mengenai peran gender di dalam organisasi.

1.6 Definisi Operasional

1.6.1 Peran

Peran adalah suatu tugas yang diharapkan oleh suatu kelompok terhadap seseorang yang harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan kelompok tersebut. Karena peran adalah suatu tugas, maka dia melekat pada suatu jabatan. Jadi peran juga ditentukan oleh jabatan dari seseorang dan bila tidak dipenuhi maka sesuatu yang buruk akan menghampiri seseorang, maupun kelompok tersebut. Di dalam penelitian ini, peran dibagi menjadi 2: *nature* dan *nurture*. Suatu peran dikatakan *nature* bila peran tersebut dilekatkan berdasarkan pada jenis kelamin, sementara peran dikatakan *nurture* bila peran tersebut diberikan tidak berdasarkan pada jenis kelamin.

1.6.2 Gender

Istilah gender seringkali disalahpahami sebagai jenis kelamin, padahal gender adalah sesuatu yang tidak nampak secara fisik melainkan melalui perilaku. Karena gender adalah sifat atau karakteristik yang ada pada diri seseorang yang bisa berubah kapan saja, tergantung di mana seseorang dibesarkan. Secara umum, gender dibagi 2: maskulin dan feminin. Biasanya maskulinitas dilekatkan pada laki-laki dan perempuan dilekatkan dengan feminitas, meskipun bisa saja berbalik

1.6.3 Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana hak atas sesuatu berada pada posisi yang setara dan tidak ada diskriminasi terhadap salah satu gender. Kesetaraan gender umumnya selalu dimaknai sebagai sesuatu yang utopis, padahal bisa dicapai sesegera mungkin bila ada usaha bersama. Dalam penelitian ini, kesetaraan gender diartikan sebagai setaranya hak atas akses, kontrol, partisipasi dan manfaat kepada semua gender.

1.6.4 Lembaga Kursus dan Pelatihan

Lembaga kursus dan pelatihan yang selanjutnya akan disingkat sebagai LKP adalah suatu lembaga yang melaksanakan pendidikan nonformal dalam hal ini kursus dan pelatihan bagi mereka yang membutuhkan tambahan kemampuan.